

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 *Signalling Theory*

*“Signalling theory, show how accounting can be used to signal information about the firm. Accounting reports are often used to signal information about a firm, particularly where earnings trends are highlight to indicate likely future earning. This is achieved by voluntarily disclosing bad news, reducing and increasing dividends, smoothing earnings, impairing assets, and recognising internally generated assets”* yang dapat diartikan “teori sinyal, menunjukkan bagaimana akuntansi dapat digunakan untuk memberi sinyal informasi tentang perusahaan. Laporan akuntansi sering digunakan untuk memberi sinyal informasi tentang perusahaan, terutama di mana *trend* pendapatan disorot untuk menunjukkan kemungkinan pendapatan di masa depan. Hal ini dicapai dengan secara sukarela mengungkapkan berita buruk, mengurangi dan meningkatkan dividen, meratakan pendapatan, penurunan nilai pada aset, dan mengakui aset yang dihasilkan secara internal” (Godfrey *et. al.*, 2010).

*“Managers use the accounts to signal expectations and intentions regarding the future. According to signalling theory, if managers expected a high level of future growth by the firm, they would try to signal that to investors via the account“* yang dapat diartikan “manajer menggunakan akun untuk menandakan ekspektasi dan niat mengenai masa depan. Menurut teori sinyal, jika manajer mengharapkan tingkat pertumbuhan masa depan yang tinggi dari perusahaan, manajer akan mencoba memberi sinyal kepada investor melalui akun” (Godfrey *et. al.*, 2010).

*“A firm should consider signaling effects when it is contemplating a change in dividend policy. For example, if a firm has good long-term prospects but also has a need for cash to fund current investments, it might be tempted to cut the dividend to increase funds available for investment. However, this action might cause the stock price to decline because the dividend reduction is taken as a signal that future earnings are likely to decline, when just the reverse is actually true. So managers should consider signaling effects when they set dividend policy”* yang dapat

diartikan “perusahaan harus mempertimbangkan efek sinyal ketika mempertimbangkan perubahan dalam kebijakan dividen. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki prospek jangka panjang yang baik tetapi juga membutuhkan uang tunai untuk mendanai investasi saat ini, mungkin tergoda untuk memotong dividen untuk meningkatkan dana yang tersedia untuk investasi. Namun, tindakan ini dapat menyebabkan harga saham turun karena pengurangan dividen dianggap sebagai sinyal bahwa pendapatan di masa depan kemungkinan besar akan menurun, padahal yang terjadi adalah kebalikannya. Jadi manajer harus mempertimbangkan efek sinyal ketika mereka menetapkan kebijakan dividen” (Brigham & Houston, 2019).

## 2.2 *Dividend*

“A dividend is a corporation's distribution of cash or shares to its shareholders on a pro rata (proportional to ownership) basis.” yang dapat diartikan, “dividen adalah distribusi uang tunai atau saham perusahaan kepada pemegang sahamnya secara proporsional terhadap kepemilikan yang dimiliki oleh *shareholder*” (Weygandt *et. al.*, 2019). “Pro rata dapat diartikan apabila memiliki kepemilikan saham biasa sebesar 10%, dividen yang akan didapatkan juga sebesar 10% atas saham biasa” (Weygandt *et. al.*, 2019). Sedangkan laman [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (BEI) “dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS”.

Menurut Kieso *et. al.*, (2018) “dividen memiliki empat tipe yang terbagi sebagai berikut”:

1. “*Cash Dividends*, distribusi uang tunai secara pro rata kepada pemegang saham. Untuk membayar dividen tunai, perusahaan harus memiliki hal sebagai berikut” (Weygandt *et. al.*, 2019).
  - a. “*Retained Earnings*, legalitas dividen tunai tergantung pada hukum negara bagian atau negara tempat perusahaan tersebut didirikan. Pembayaran dividen tunai dari saldo laba adalah legal di semua yurisdiksi. Secara”

“umum, pembagian dividen tunai hanya dari saldo dalam modal saham biasa, adalah ilegal”.

- b. “*Adequate Cash*, legalitas dividen dan kemampuan dalam membayar dividen adalah dua hal yang berbeda. Contohnya, suatu perusahaan dengan saldo laba lebih dari Rp 5 miliar, secara hukum dapat mendeklarasikan dividen setidaknya sebesar Rp 5 miliar. Tetapi perusahaan hanya memiliki saldo *cash* sebesar Rp 1,6 miliar, sehingga perusahaan hanya memiliki kemampuan dalam membayar dividen hanya sebesar Rp 1,6 miliar. Sebelum mendeklarasikan dividen tunai, dewan direksi perusahaan harus mempertimbangkan secara matang, permintaan atau tuntutan perusahaan di masa ini dan di masa yang akan datang, terkait dengan sumber daya kas perusahaan”.
  - c. “*Declaration of Dividends*, perusahaan tidak dapat membayarkan dividen, apabila dewan direksi perusahaan sudah memutuskan hal demikian terkait “deklarasi” dividen. Dewan direksi memiliki kewenangan secara penuh dalam menentukan besaran keuntungan perusahaan, didistribusikan dalam bentuk dividen dan jumlah yang harus dipertahankan dalam bisnis”.
2. “*Property Dividends*, menggunakan aset atau barang selain dari kas. Dividen properti dapat berupa barang dagangan, *real estate*, atau investasi, atau apa pun yang ditentukan oleh dewan direksi. Saat mengumumkan dividen properti. Korporat harus menyatakan kembali pada nilai wajar properti yang akan didistribusikannya, mengakui setiap keuntungan atau kerugian sebagai perbedaan antara nilai wajar properti dan nilai tercatat pada tanggal deklarasi. Korporat kemudian dapat mencatat dividen yang diumumkan sebagai debit dari *retained earnings* (atau *property dividend* yang diumumkan) dan kredit untuk *property dividend payable*, pada jumlah yang sama dengan nilai wajar dari properti yang dibagikan. Pada saat pembagian dividen, korporat mendebit *property dividend payable* dan mengkredit akun yang berisi aset yang dibagikan (disajikan kembali pada nilai wajar)”.
  3. “*Liquidating Dividends*, dividen berdasarkan selain saldo laba digambarkan sebagai dividen likuidasi. Istilah ini menyiratkan bahwa dividen tersebut”

“adalah pengembalian investasi pemegang saham daripada keuntungan. Dengan kata lain, dividen apa pun yang tidak didasarkan pada pendapatan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham adalah dividen likuidasi. Perusahaan dalam industri ekstraktif dapat membayar dividen sama dengan total akumulasi pendapatan dan deplesi. Bagian dari dividen ini yang melebihi akumulasi pendapatan merupakan pengembalian sebagian dari investasi pemegang saham”.

4. “*Share Dividends*, pembagian pro rata kepada pemegang saham dengan saham yang beredar dalam suatu perusahaan. Dividen saham menghasilkan penurunan *retained earnings* dan peningkatan *share capital* dan *share premium*. Tidak seperti *cash dividend*, *share dividend* tidak mengurangi total ekuitas dan total aset. Sebagai ilustrasi A mempunyai kepemilikan saham 2% pada perusahaan ABC yang berarti A memiliki 20 dari 1.000 lembar saham perusahaan. Jika perusahaan ABC mengumumkan dividen saham 10%, maka akan diterbitkan 100 lembar saham ( $1.000 \times 10\%$ ). Anda akan menerima dua bagian ( $2\% \times 100$ ). Jadi kepemilikan A adalah tetap 2% ( $22$  dibagi  $1.100$ ). Sehingga total saham yang terima lebih besar, namun kepentingan kepemilikan tidak berubah”.

“Terdapat tanggal penting terkait pembayaran *Cash Dividend*” (Weygandt *et. al.*, 2019):

1. “*The Declaration Date*, tanggal dewan direksi mengumumkan pembagian dividen kas kepada *shareholder*. Deklarasi dividen mengikat korporasi untuk kewajiban hukum. Perusahaan perlu mengakui adanya kenaikan *Cash Dividend* dan kenaikan adanya kewajiban *Dividend Payable*. Sebagai contoh tanggal pengumuman dividen tunai adalah 1 Desember 2021, pada tanggal pengumuman perusahaan mencatat jurnal sebagai berikut”:

1 Des 2021	<i>Cash Dividend</i>	<i>xxx</i>
	<i>Dividend Payable</i>	<i>xxx</i>

2. “*The Record Date*, perusahaan menentukan kepemilikan saham biasa yang beredar untuk keperluan dividen. Tujuan dari tanggal pencatatan adalah untuk mengidentifikasi orang atau entitas yang akan menerima dividen, bukan untuk menentukan jumlah *Dividend Payable* (dividen terutang). Dalam interval antara tanggal deklarasi dan tanggal pencatatan, korporasi memperbarui catatan kepemilikan sahamnya. Sebagai contoh tanggal pencatatan adalah 22 Desember 2021, tidak diperlukan entri jurnal untuk tanggal ini, karena tanggung jawab perusahaan yang diakui pada tanggal deklarasi tidak berubah sehingga tidak ada jurnal yang dilakukan pada tanggal pencatatan”.

22 Des 2021	<i>No Entry</i>	<i>xxx</i>
-------------	-----------------	------------

3. “*The Payment Date*, perusahaan melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang tercatat dan mengakuinya. Pada pembayaran dividen ini mengurangi aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Hal ini juga tidak memengaruhi ekuitas. Namun efek kumulatif dari deklarasi dan pembayaran dividen tunai akan mengurangi ekuitas dan total aset. Sebagai contoh tanggal pembayaran adalah 1 Januari 2022, pada tanggal pembayaran dividen perusahaan mencatat jurnal sebagai berikut”:

1 Jan 2022	<i>Dividend Payable</i>	<i>xxx</i>
	<i>Cash</i>	<i>xxx</i>

“Pada saat menggunakan akun *Cash Dividend*, perusahaan perlu mentransfer saldo akun tersebut ke dalam *Retained Earnings* pada saat akhir periode menggunakan *closing entry*, dengan membuat jurnal sebagai berikut”:

31 Des 2020	<i>Retained Earnings</i>	<i>xxx</i>
	<i>Cash Dividend</i>	<i>xxx</i>

“Bentuk *return* lain atas investasi saham adalah dividen” (BEI). “Terkait dengan pencatatan efek pertama kali, terdapat hal-hal yang harus dipersiapkan calon emiten dalam rangka penawaran umum, sebagai berikut” (BEI)”

1. “Persetujuan pemegang saham pendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi (*Underwriter*) serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, termasuk upaya pemasaran agar penawaran umum tersebut sukses. Dengan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, perusahaan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan seperti :
  - a. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
  - b. Anggaran dasar berikut amandemennya yang disiapkan Notaris dan disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - c. Legal Audit dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - d. Laporan Penilaian dari Penilai Independen yang terdaftar di OJK, jika ada;
  - e. Prospektus Penawaran Umum; dan beberapa dokumen lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku”.

“Lalu proses pencatatan efek menurut BEI, untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatitkan dan diperdagangkan di Bursa, perusahaan perlu memperoleh persetujuan dari Bursa dengan mengajukan permohonan pencatatan kepada Bursa dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sepanjang dokumen-dokumen dan informasi yang disampaikan telah mencukupi dan lengkap, Bursa hanya memerlukan waktu 10 hari Bursa untuk memberikan persetujuan. Jika memenuhi syarat, Bursa akan memberikan surat persetujuan prinsip pencatatan yang dikenal dengan istilah Perjanjian Kontrak Pendahuluan Pencatatan Efek” (BEI).



“Setelah mendapat Perjanjian Pendahuluan dari Bursa, calon Emiten tersebut mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK untuk melakukan Penawaran Umum. Apabila Pernyataan Pendaftaran calon Emiten telah dinyatakan efektif oleh OJK maka calon Emiten tersebut dapat melakukan proses Penawaran Umum. Pada umumnya, keseluruhan proses Penawaran Umum dari surat pernyataan efektif sampai dengan perusahaan tercatat di Bursa hanya memerlukan waktu 8 - 12 hari kerja, bergantung pada berapa lama masa Penawaran Umum kepada publik yang ditentukan oleh calon Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi. Setelah masa Penawaran Umum tersebut berakhir, maka perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa” (BEI).

### **2.2.1 Kebijakan Dividen**

“Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan mengenai pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Kebijakan dividen adalah salah satu isu yang paling diperdebatkan dari sektor korporasi” (Delikartika & Ferry, 2017 dalam Lie & Osesoga, 2020). Teori yang berkaitan dengan kebijakan dividen yaitu:

1. “*Dividend Irrelevance Theory*. Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani (MM), mereka berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besarnya *Dividend Payout Ratio* namun nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasarnya dalam menghasilkan laba dan risiko bisnisnya” (Brigham & Houston, 2001 dalam Lie & Osesoga, 2020).
2. “*Bird In The Hand Theory*. Gordon & Lintner berargumentasi bahwa, pembayaran dividen dapat mengurangi ketidakpastian investor, sebaliknya jika perusahaan mengurangi atau tidak membayarkan dividen, ketidakpastian investor akan meningkat, meningkatkan *return* yang diperlukan dan menurunkan nilai pada saham (Zutter & Scott, 2017). Investor lebih menghargai pendapatan dari dividen dibandingkan dengan *capital gain* karena komponen hasil dividen risikonya lebih kecil dari komponen *capital gain*” (Wijayanto & Putri, 2018 dalam Lie & Osesoga, 2020).

3. *“Tax Preference Theory*. Teori ini memiliki dua alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi, karena keuntungan modal (*capital gain*) dikenakan tarif pajak lebih rendah daripada pendapatan dividen, dan pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai sahamnya terjual sehingga ada efek nilai waktu” (Suci, 2016 dalam Lie & Osesoga, 2020).
4. *“Information Content or Signaling Theory*. Suatu teori yang menyatakan bahwa investor menilai perubahan dividen sebagai pertanda bagi perkiraan manajemen atas laba. Modigliani dan Miller berpendapat bahwa kenaikan dividen atas jumlah yang diharapkan merupakan suatu sinyal bagi investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan laba yang baik di masa depan. Sebaliknya, penurunan dividen atau kenaikan dalam jumlah lebih kecil dari” “yang diharapkan, merupakan sinyal bahwa manajemen meramalkan laba masa depan yang buruk” (Wijayanto & Putri, 2018 dalam Lie & Osesoga, 2020).
5. *“Clientele Effect*. Teori ini menjelaskan bahwa rasio pembayaran yang berbeda menarik berbagai jenis investor tetapi tetap tidak mengubah nilai perusahaan” (Gitman & Zutter, 2015 dalam Lie & Osesoga, 2020).

Menurut Gitman & Zutter, (2015) dalam Lie & Osesoga, (2020) “terdapat tiga jenis kebijakan dividen yang digunakan perusahaan, yaitu”:

1. *“Constant payout ratio dividend policy*, kebijakan dividen rasio pembayaran konstan adalah kebijakan dividen yang membayarkan dividen berdasarkan persentase tertentu pada setiap periodenya”.
2. *“Regular dividend policy*, kebijakan dividen ini dilakukan berdasarkan pembayaran dengan jumlah per mata uang yang tetap setiap periodenya. Perusahaan biasanya menggunakan kebijakan dividen ini dengan menaikkan regular dividen setelah kenaikan pendapatan secara berkelanjutan terjadi dalam perusahaan”.
3. *“Low regular and extra dividend policy*, kebijakan dividen ini dilakukan berdasarkan pada pembayaran dividen teratur yang rendah dan ditambahkan



dengan bonus dividen saat perusahaan mendapatkan yang lebih tinggi daripada periode yang telah ditentukan. Dengan adanya bonus dividen, perusahaan menghindari pandangan mengenai peningkatan dividen adalah permanen. Kebijakan dividen ini banyak digunakan pada perusahaan yang memiliki banyak pergeseran pendapatan”.

Menurut Livoreka. *et. al.*, (2014), dalam Tjhoa (2020), “faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, sebagai berikut”:

1. “Faktor eksternal, terdiri atas”:
  - a. “*The overall economy*, pada kondisi perekonomian tidak pasti, maka manajemen akan cenderung menahan labanya dalam bentuk saldo laba, sebagai cadangan atas ketidakpastian bisnis di masa depan”.
  - b. “*Situation on capital market*, pada pasar modal stabil dan secara umum sering terjadi pergerakan dalam harga saham, maka kebijakan dividen perusahaan cenderung lebih liberal”.
  - c. “*Legal restrictions*, beberapa negara menerapkan aturan yang berbeda-beda terkait pembagian dividen. Biasanya pembagian dividen dapat bersumber dari laba tahun berjalan atau sisa laba tahun sebelumnya yang dicadangkan, namun pembagian laba yang bersumber dari modal pemegang saham umumnya tidak diperbolehkan”.
  - d. “*Contractual restrictions*, beberapa kreditur menetapkan pembatasan pembagian dividen untuk mengamankan pembayaran kewajiban perusahaan kepada pihak kreditur”.
  - e. “*Entries in capital market*, perusahaan besar dan memiliki laba yang stabil biasanya memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal. Namun bagi perusahaan kecil dengan akses yang lebih sulit, akan cenderung menyimpan labanya dalam bentuk saldo laba sebagai sumber tambahan modal di masa mendatang”.

2. “Faktor internal, terdiri atas”:

- a. “*Shareholders expectations*, terdapat dua jenis imbal hasil yang diharapkan oleh pemegang saham, yaitu dividen dan *capital gain*. Investor yang lebih *risk averse* biasanya lebih memilih dividen karena pendapatan dari dividen lebih pasti, mengindikasikan kekuatan finansial perusahaan, dan untuk kebutuhan investor akan dana secara periodik”.
- b. “*Fiscal situation of shareholders*, pemegang saham pada negara yang menetapkan pajak yang tinggi atas dividen akan lebih memilih untuk menunda atau bahkan mendapatkan *return* dalam bentuk selain dividen”.
- c. “*Others*, diantaranya kondisi likuiditas perusahaan, kebutuhan dana untuk pembayaran utang, stabilitas saldo laba, dan banyak lainnya”.

“Menurut Zutter & Scott, (2017) “*the term of Payout Ratio refers to the decisions that firms make about whether to distribute cash to shareholders, how much cash to distribute, and by what means the cash should be distributed*”, yang dapat diartikan “istilah rasio pembayaran mengacu pada keputusan yang diambil perusahaan tentang apakah akan mendistribusikan kas kepada pemegang saham, berapa banyak kas yang akan didistribusikan, dan dengan cara apa uang tersebut harus didistribusikan”.

“Kebijakan dividen merupakan suatu kebijakan penting dalam perusahaan yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara seksama. Dalam kebijakan dividen ditentukan jumlah alokasi laba yang dapat dibagikan kepada pemegang saham (dividen) dan alokasi laba yang harus ditahan perusahaan” (Sari, Oemar & Andini, 2016 dalam Gunawan & Harjanto, 2019).

### 2.2.2 *Dividend Payout Ratio*

Menurut Zutter & Scott (2017) “*Dividend Payout Ratio, indicates the percentage of each dollar earned that a firm distributes to the owners in the form of cash. It is calculated by dividing the firm’s cash dividend per share by its earnings per share*” yang dapat diartikan “rasio pembayaran dividen menunjukkan persentase dari setiap dolar yang diperoleh yang didistribusikan perusahaan kepada pemiliknya dalam

bentuk uang tunai. Ini dihitung dengan membagi dividen tunai per saham perusahaan dengan laba per sahamnya”.

Menurut Weygandt *et. al.*, (2019) “*the payout ratio, measure the percentage of earnings distributed in the form of cash dividends*” yang dapat diartikan “*payout ratio* adalah pengukuran persentase laba bersih yang didistribusikan dalam bentuk dividen tunai”. Menurut Kurniawan *et. al.*, (2016) dalam Tjhoa (2020) “rasio pembayaran dividen menentukan jumlah laba yang dibagi dalam bentuk dividen kas dan saldo laba sebagai sumber pendanaan”.

“Ketika kebijakan dividen ditetapkan, satu kebijakan tidak dapat berlaku untuk semuanya. Beberapa perusahaan dapat menghasilkan uang tunai dalam jumlah yang besar, tetapi memiliki peluang investasi yang terbatas, ini dapat berlaku untuk perusahaan dalam industri yang *profitable* tetapi *mature industries*,” “jadi sedikit peluang pertumbuhan yang ada. Perusahaan seperti itu biasanya mendistribusikan sebagian besar uangnya ke *shareholders*, sehingga menarik investor yang lebih menyukai dividen tinggi” (Brigham & Houston, 2019).

“Perusahaan lain memiliki banyak peluang investasi yang baik tetapi menghasilkan sedikit atau tidak ada kelebihan uang tunai. Perusahaan seperti itu umumnya mendistribusikan sedikit atau tidak sama sekali dividen tunai, tetapi melakukan kenaikan pendapatan dan harga saham, sehingga menarik investor yang lebih memilih *capital gain*” (Brigham & Houston, 2019). Pernyataan Brigham & Houston, (2019) sejalan dengan Ross *et. al.*, (2019), yang mengatakan “perusahaan muda yang tumbuh cepat biasanya menggunakan *payout ratio* yang rendah, sedangkan perusahaan yang lebih tua dan tumbuh lebih lambat di industri yang lebih matang menggunakan *payout ratio* yang lebih tinggi”.

“Menurut Purwanto & Sumarto, (2017) perusahaan yang berkembang selalu membutuhkan dana baru untuk diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan. Sumber dana baru yang merupakan modal sendiri (*equity*) dapat berupa penjualan saham baru dan saldo laba. Manajemen cenderung memanfaatkan saldo laba karena penjualan saham baru menimbulkan biaya peluncuran saham (*flotation cost*). Oleh karena itu semakin besar kebutuhan dana investasi, semakin kecil *dividend payout ratio*” (Pangaribuan *et. al.*, 2020).

Sebaliknya menurut Widyawati & Indriani, (2019) “semakin besar proporsi dividen yang dibagikan oleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula proporsi laba yang dibagikan sebagai dividen, dan semakin kecil proporsi saldo laba yang digunakan perusahaan untuk melakukan investasi dan menunjang kegiatan operasional, sehingga semakin tinggi *dividend payout ratio*”. Perhitungan *Dividend Payout Ratio (DPR)* berdasarkan Gitman & Zutter (2015) dalam Lie & Osesoga (2020) sebagai berikut”:

$$DPR = \frac{\text{Dividend Per Share}}{\text{Earning Per Share}} \quad [2.1]$$

Rumus 2.1 Formula *Dividend Payout Ratio*  
 Sumber: Gitman & Zutter, (2015) dalam Lie & Osesoga, (2020)

Keterangan:

*Dividend Per Share*: dividen per lembar saham

*Earning Per Share*: laba bersih per lembar saham

“Menurut Zutter & Scott, (2017) “*Dividend Per Share (DPS)*, adalah jumlah uang tunai yang didistribusikan selama periode tersebut atas nama setiap saham biasa yang beredar.” Perhitungan *DPS* berdasarkan Zutter & Scott, (2017) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DPS = \frac{\text{Total Dividend Paid}}{\text{Number of Shares of Common Stock Outstanding}} \quad [2.2]$$

Rumus 2.2 Formula *Dividend Per Share*  
 Sumber: Zutter & Scott, (2017)

Keterangan:

*Total Dividend Paid*: jumlah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan

*Number of Shares of Common Stock Outstanding*: jumlah saham biasa beredar yang dimiliki perusahaan

Berdasarkan IAI (2018) PSAK 1 nomor 79 dan 107, “entitas mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode dan jumlah dividen per saham terkait.”, dan nomor 137 berisikan “entitas mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah terkait dividen per lembar saham; dan jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui” (IAI, 2018).

“*Earning Per Share (EPS)* merupakan ukuran dari pendapatan bersih yang diperoleh pada setiap lembar saham biasa” (Weygandt *et. al.*, 2019). Perhitungan *EPS* berdasarkan Weygandt *et. al.*, (2019) sebagai berikut:

$$EPS = \frac{Net\ Income - Preference\ Dividend}{Weighted\ Average\ Shares\ Outstanding} \quad [2.3]$$

Rumus 2.3 Formula *Earning Per Share*  
Sumber: Weygandt *et. al.*, (2019)

Keterangan:

*Net Income*: jumlah laba bersih perusahaan  
*Preference Dividends*: jumlah dividen saham preferen”  
“*Weighted-Average Ordinary Shares Outstanding*: jumlah rata-rata tertimbang saham biasa

Dalam PSAK 56 (IAI, 2018) “tentang laba per saham, untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar, jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk terkait dengan sebagai berikut”:

- a) “Laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk; dan”.
- b) “Laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk”.

“Seluruh pos penghasilan dan beban yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk diakui dalam satu periode, termasuk beban pajak dan dividen saham preferen yang diklasifikasikan sebagai liabilitas

diperhitungkan dalam penentuan laba atau rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk” (IAI, 2018).

Menurut Weygandt *et. al.*, (2019) “*net income* adalah jumlah pendapatan melebihi biaya.” Sedangkan dalam Kieso *et. al.*, (2018) “*net income* adalah hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu”. “*Preference dividends* merupakan kepemilikan pemegang saham preferen yang memiliki hak untuk menerima pembagian dividen sebelum pemegang saham biasa” (Weygandt *et. al.*, 2019). “Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban dan menghasilkan *net income* atau *net loss* untuk periode waktu tertentu. *Net income* ditambahkan ke saldo awal saldo laba dalam laporan perubahan ekuitas” (Weygandt *et. al.*, 2019). Kemudian pada IAI, (2018) PSAK 1 nomor 137 “entitas mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui”.

Menurut Kieso *et. al.*, (2018), “rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode tertentu merupakan dasar untuk jumlah per saham yang” “dilaporkan. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode berjalan mempengaruhi jumlah saham yang beredar. Perusahaan harus menimbang saham dengan fraksi dari periode saham beredar. Pendekatan ini adalah untuk menemukan jumlah ekuivalen seluruh saham yang beredar untuk tahun tersebut” (Weygandt *et. al.*, 2019). Berikut merupakan ilustrasi untuk mendapatkan *Weighted-Average Ordinary Shares Outstanding* (Weygandt *et. al.*, 2019):

Date	Share Changes	Shares Outstanding
January 1	Beginning balance	90,000
April 1	Issued 30,000 shares for cash	30,000
		<u>120,000</u>
July 1	Purchased 39,000 shares	(39,000)
		<u>81,000</u>
November 1	Issued 60,000 shares for cash	60,000
December 31	Ending balance	<u>141,000</u>

Gambar 2.1 Ilustrasi peredaran *share outstanding* dalam suatu periode  
 Sumber: *Intermediate Accounting* (Kieso *et. al.*, 2018)



Dates Outstanding	(A) Shares Outstanding	(B) Fraction of Year	(C) Weighted Shares (A × B)
Jan. 1–Apr. 1	90,000	3/12	22,500
Apr. 1–July 1	120,000	3/12	30,000
July 1–Nov. 1	81,000	4/12	27,000
Nov. 1–Dec. 31	141,000	2/12	23,500
Weighted-average ordinary shares outstanding			<u>103,000</u>

Gambar 2.2 Perhitungan *Weighted-Average Ordinary Shares Outstanding* (WAOS)  
Sumber: *Intermediate Accounting* (Kieso et. al., 2018)

Berdasarkan IAI (2018) PSAK 1 nomor 54, “laporan posisi keuangan mencakup penyajian modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.”, dan nomor 79 “entitas mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan”:

- a) “untuk setiap jenis modal saham:
  1. Jumlah saham modal dasar;
  2. Jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh;
  3. Nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal;”
  4. “Rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode;
  5. Hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham, termasuk pembatasan pembagian dividen dan pelunasan atas modal;
  6. Saham entitas yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau oleh entitas asosiasi; dan
  7. Saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan”.
- b) “Deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas” (IAI, 2018).

### 2.3 Profitability Ratio

“Menurut Weygandt *et. al.*, (2019) “*profitability ratio measure the income or operating success of a company for a given period of time. Income, or the lack of it, affects the company's liquidity position and the company's ability to grow. As a consequences, both creditors and investors are interested in evaluating earning power-profitability. Analysts frequently use profitability as the ultimate test of management operating effectiveness*” yang dapat diartikan “rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan operasional suatu perusahaan untuk jangka waktu yang ditentukan, dan juga pendapatan yang diperoleh perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan memperoleh utang dan pendanaan melalui ekuitas. Hal ini juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Demi suatu kepentingan, baik kreditur maupun investor tertarik untuk mengevaluasi kekuatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Analisis sering menggunakan profitabilitas sebagai pengukuran untuk efektivitas operasi manajemen” (Weygandt *et. al.*, 2019).

Menurut Weygandt *et. al.*, (2019), “terdapat tujuh rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan, yaitu”:

1. “*Profit Margin*, digunakan untuk mengukur persentase setiap mata uang penjualan yang menghasilkan laba bersih. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan penjualan bersih”.
2. “*Asset Turnover*, digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini ditentukan dengan membagi penjualan bersih dengan rata-rata total aset.
3. *Return on Assets*, ukuran profitabilitas secara keseluruhan atas tingkat pengembalian aset. Rasio ini memperhitungkan laba bersih yang dibagi dengan rata-rata total aset. Menurut Braun & Wendy (2015) rasio” “pengembalian aset, mengukur keberhasilan dalam menggunakan aset untuk mendapatkan keuntungan”.
4. “*Return on Ordinary Shareholders Equity*, digunakan untuk mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak mata uang dari laba bersih yang diperoleh

perusahaan untuk setiap mata uang yang diinvestasikan oleh pemilik. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata saham biasa. Ketika perusahaan memiliki saham preferen, maka perlu mengurangi persyaratan dividen preferen dari laba bersih untuk menghitung laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa”.

5. “*Earnings per Share*, digunakan untuk mengukur laba bersih yang diestimasikan dari setiap lembar saham biasa. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan jumlah tertimbang rata-rata saham biasa yang beredar selama tahun tersebut. Ukuran laba bersih yang diperoleh dengan basis per saham memberikan perspektif yang berguna untuk menentukan profitabilitas”.
6. “*Price-Earnings Ratio*, rasio yang sering digunakan untuk mengukur harga pasar dari setiap saham biasa terhadap laba per saham. *PER* mencerminkan penilaian investor terhadap pendapatan perusahaan di masa depan. Rasio ini dihitung dengan membagi harga pasar per saham dengan *EPS*”.
7. “*Payout Ratio*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur persentase laba yang didistribusikan dalam bentuk dividen tunai. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi dividen tunai yang diumumkan pada saham biasa dengan laba bersih. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi umumnya” “memiliki rasio pembayaran yang rendah karena mereka menginvestasikan kembali sebagian besar laba bersihnya ke dalam bisnis”.

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas menggunakan *proxy Return on Assets (ROA)*”.

### 2.3.1 *Return on Assets*

“Menurut Hanafi, (2014) dalam Krisardiyansah & Amanah, (2020), “rasio *Return on Assets (ROA)* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat *asset* tertentu”. Pengertian tersebut selaras menurut Hery, (2015) dalam Hantono, (2019) yaitu “hasil pengembalian atas aset (*Return on*

*Assets*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih”.

Menurut Hanif & Bustamam, (2017) "perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang tinggi pula. Semakin besar *ROA* menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian investasi (*return*) semakin besar”. Hal ini juga sejalan menurut Widyawati & Indriani, (2019) “rasio *ROA* yang tinggi akan ditangkap oleh investor sebagai sinyal yang baik bahwa perusahaan dapat mengelola asetnya dan menghasilkan keuntungan dengan baik. Peningkatan keuntungan tentunya menjadi stimulus bagi investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan”.

Menurut Subramanyam, (2014) “*margin* keuntungan yang rendah mencakup metode produksi yang tidak efisien, lini produk yang tidak menguntungkan, kelebihan kapasitas dengan biaya tetap yang tinggi, atau biaya penjualan dan administrasi yang berlebihan. Perusahaan dengan *margin* keuntungan yang rendah terkadang menemukan bahwa perubahan selera dan teknologi (*assets*) memerlukan peningkatan investasi dalam aset untuk membiayai penjualan. Ini menyiratkan bahwa untuk mempertahankan *return on assets*, perusahaan harus meningkatkan margin keuntungannya atau produksi tidak lagi menghasilkan uang” (Subramanyam, 2014).

Brigham & Houston (2019) berpendapat bahwa “*ROA* yang rendah dapat dihasilkan dari keputusan untuk menggunakan banyak utang, dalam hal ini beban bunga yang tinggi akan menyebabkan laba bersih menjadi relatif rendah”. *ROA* yang rendah “menunjukkan manajemen yang tidak efektif dalam menghasilkan keuntungan dengan aset yang tersedia” (Zutter & Scott, 2017). Perhitungan *ROA* berdasarkan Weygandt *et. al.*, (2019) sebagai berikut”:

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Assets}} \quad [2.4]$$

Rumus 2.4 Formula *Return on Assets*  
Sumber: Weygandt *et. al.*, (2019)

Keterangan:

*Net Income:* jumlah laba bersih perusahaan

*Average Total Assets:* rata-rata total aset

Berdasarkan IAI, (2018) PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, menggambarkan penyajian laba tahun berjalan (*net income*) sebagai berikut:

KELOMPOK USAHA XYZ		
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah)		
	20X7	20X6
Pendapatan	390.000	355.000
Beban pokok penjualan	(245.000)	(230.000)
Laba bruto	145.000	125.000
Penghasilan lain	20.667	11.300
Biaya distribusi	(9.000)	(8.700)
Beban administrasi	(20.000)	(21.000)
Beban lain-lain	(2.100)	(1.200)
Biaya pendanaan	(8.000)	(7.500)
Bagian laba entitas asosiasi <sup>1</sup>	35.100	30.100
Laba sebelum pajak	161.667	128.000
Beban pajak penghasilan	(40.417)	(32.000)
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	121.250	96.000
Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	-	(30.500)
Laba tahun berjalan	121.250	65.500

Gambar 2.3 Ilustrasi penyajian laba tahun berjalan pada laporan laba rugi.  
Sumber: PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2018)

“Laba tahun berjalan didapatkan dari, pertama pendapatan usaha dikurangi dengan beban pokok penjualan (*cost of goods sold*) dan akan menghasilkan laba bruto. Kemudian laba bruto ditambahkan dengan penghasilan lain-lain, lalu” “dikurangi dengan beban distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, biaya pendanaan, serta dapat ditambahkan dengan bagian laba entitas asosiasi yang merupakan laba entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, akan menghasilkan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak kemudian dikurangi dengan beban pajak penghasilan, sehingga menghasilkan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan dikurangi dengan kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan, maka akan mendapatkan laba tahun berjalan” (IAI, 2018 PSAK 1).

Perhitungan “*average total assets* dihitung dengan menjumlahkan saldo awal dan saldo akhir total assets lalu dibagi dua” (Weygandt, *et. al.*, 2019). Perhitungan *average total assets* berdasarkan Weygandt *et. al.*, (2019) sebagai berikut:

$$\text{Avg Total Assets} = \frac{\text{Total Assets}_{(t)} + \text{Total Assets}_{(t-1)}}{2} \quad [2.5]$$

Rumus 2.5 Formula Average Total Assets  
Sumber: Weygandt *et. al.*, (2019)

Keterangan:

$\text{Total Assets}_{(t)}$ : total aset pada tahun t

$\text{Total Assets}_{(t-1)}$ : total aset setahun sebelum tahun t

Menurut Kieso *et. al.*, (2018) “aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi masa yang akan datang dalam suatu perusahaan”. Aset terbagi menjadi dua bagian *current assets* dan *non-current assets*. “*Current assets* adalah kas atau aset lain, yang diharapkan perusahaan dapat dikonversikan ke kas, dijual, atau digunakan dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasional, yang mana yang lebih lama” (Kieso *et. al.*, 2018). Kieso *et. al.*, (2018) membagi *Current Assets* menjadi 5 yang terdiri dari:

1. “*Cash and Cash Equivalent, cash* umumnya dianggap terdiri dari mata uang dan giro (uang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan). *Cash equivalent* adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang. Sebagian besar kas dan setara kas, menunjukkan bahwa jumlah ini mendekati nilai wajar”.
2. “*Short-term investment*, akun ini perlu melaporkan adanya *trading securities* sebagai *current asset*. Serta harus dilaporkan sebagai *held-for-collection* ditagih (kadang-kadang disebut sebagai dimiliki hingga jatuh tempo atau” “*held-to-maturity*) dengan biaya perolehan diamortisasi. Semua sekuritas yang diperdagangkan dilaporkan pada nilai *fair value*”.
3. “*Receivables*, perusahaan harus dengan jelas mengidentifikasi setiap kerugian yang diantisipasi karena *uncollectibles*, jumlah dan sifat dari setiap *non-trade receivables*, dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan”.



4. “*Inventories*, persediaan adalah item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Investasi dalam bentuk persediaan, seringkali dijadikan sebagai aset lancar terbesar dalam perdagangan dan perusahaan manufaktur”.
5. “*Prepaid Expense*, biaya dibayar dimuka yang dibayarkan atau dicatat sebelum perusahaan gunakan. Ketika beban dibayar dimuka, perusahaan perlu mendebitkan akun tersebut untuk menunjukkan manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang. Contoh pembayaran dimuka pada umumnya adalah, asuransi, persediaan, periklanan, sewa. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang berakhir baik dengan berlalunya waktu (misalnya sewa dan asuransi) atau melalui penggunaan dan konsumsi (misalnya perlengkapan)”.

“Pengertian dari *non-current assets* aset yang tidak termasuk dalam definisi *current assets*” (Kieso *et. al.*, 2018). Kieso *et. al.*, (2018) “membagi *Non-current Assets* menjadi 4 yaitu”:

1. “*Long-term investment*, investasi jangka panjang atau yang lebih sering disebut investasi terdiri atas 4 jenis yaitu”:
  - a. “Investasi dalam sekuritas, seperti obligasi, saham, ataupun surat utang jangka panjang.
  - b. Investasi dalam aset berwujud yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional, seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi.
  - c. Investasi dalam dana yang disisihkan, seperti dana cadangan untuk pembayaran utang, dana pensiun atau dana untuk ekspansi.
  - d. Investasi dalam perusahaan non konsolidasi atau perusahaan terkait”.
2. “*Property, plant and equipment*, properti, tanah dan peralatan merupakan aset berwujud yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama untuk kegiatan operasional perusahaan. Aset ini terdiri atas properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, perabotan, peralatan, dan *wasting resources* (*minerals*)”.

3. “*Intangible assets*, merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Terdiri atas paten, hak cipta, *goodwill*, merk dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan”.
4. “*Other assets*, Item yang termasuk dalam bagian aset lainnya pada kenyataannya sangat bervariasi. Beberapa item yang termasuk didalamnya adalah beban di bayar dimuka jangka panjang dan piutang jangka panjang”.

Penyajian aset dalam laporan keuangan tertuang pada PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan nomor 54 yang berbunyi: “informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan mencakup pos-pos berikut: aset tetap; properti investasi; aset tak berwujud; aset keuangan; investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69: Agrikultur; persediaan; piutang usaha dan piutang lain; kas dan setara kas; serta total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepas yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan” (IAI, 2018). Dasar pengukuran aset diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yaitu”:

1. “Biaya historis. Digunakan sejauh belum habis digunakan atau belum seluruhnya terkumpul dan dapat dipulihkan”.
2. “Nilai wajar (asumsi pelaku pasar). Harga yang akan diterima untuk menjual aset (tanpa mengurangkan biaya transaksi pada saat pelepasan)”.
3. “Nilai pakai (asumsi spesifik-entitas). Nilai kini dari arus kas masa depan dari penggunaan aset dan dari pelepasan akhirnya (setelah dikurangi nilai kini dari biaya transaksi pada saat pelepasan)”.
4. “Biaya kini. Digunakan sejauh belum habis digunakan atau belum seluruhnya terkumpul dan dapat dipulihkan”.

KELOMPOK USAHA XYZ		
Laporan posisi keuangan per 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah)		
	31 Des 20X7	31 Des 20X6
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	312.400	322.900
Piutang usaha	91.600	110.800
Persediaan	135.230	132.500
Aset lancar lain	25.650	12.540
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>564.880</b>	<b>578.740</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Investasi pada instrumen ekuitas	142.500	156.000
Investasi dalam entitas asosiasi	100.150	110.770
Aset tetap	350.700	360.020
Aset takberwujud lain	227.470	227.470
Goodwill	80.800	91.200
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>901.620</b>	<b>945.460</b>
<b>Total Aset</b>	<b>1.466.500</b>	<b>1.524.200</b>

Gambar 2.4 Ilustrasi penyajian akun aset pada laporan posisi keuangan  
Sumber: PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2018)

### 2.3.2 Pengaruh *Return on Assets* terhadap *Dividend Payout Ratio*

“*Return on Assets* menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar *ROA*, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang besar, dan sebaliknya” (Sudana, 2011 dalam Tjhoa, 2020). “*Return on Assets* yang tinggi berarti perusahaan semakin efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi laba bersih yang mampu dihasilkan, maka potensi perusahaan untuk mendistribusikan laba tersebut dalam bentuk dividen tunai akan” “semakin besar juga. Jika dividen tunai yang dibagikan lebih besar daripada laba yang diestimasikan dapat diperoleh pemegang saham, maka *Dividend Payout Ratio* akan meningkat” (Tjhoa, 2020).

Hasil penelitian dari Wiydawati & Indriani (2019), dan Fadah (2020) “menyatakan *Return on Assets* berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*”. Serta hasil penelitian dari Krisardiyansah & Amanah, (2020) mengatakan “profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA* berpengaruh terhadap kebijakan” “dividen yang diproksikan dengan *DPR*”. Berbeda hal dengan hasil penelitian dari

Fauzi & Rukmini (2018), dan Hantono (2019), “menyatakan *Return on Assets* tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan *Dividend Payout Ratio*.”

**Ha<sub>1</sub>:** *Return on Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR)*

#### 2.4 *Liquidity Ratio*

“*Liquidity ratio, measures of the short-term ability of the company to pay maturing obligations and to meet unexpected needs for cash*” yang dapat diartikan “rasio likuiditas adalah pengukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan tak terduga akan uang tunai” (Weygandt *et. al.*, 2019).

Menurut Weygandt *et. al.*, (2019), “terdapat empat rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan, yaitu”:

1. “*Current Ratio*, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek atau kewajiban yang akan jatuh tempo. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan utang lancar”.
2. “*Acid-Test Ratio*, merupakan ukuran likuiditas jangka pendek langsung perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi jumlah uang tunai, investasi jangka pendek dan piutang bersih dengan utang lancar”.
3. “*Accounts Receivable Turnover*, digunakan untuk mengukur likuiditas dengan seberapa cepat suatu perusahaan dapat mengonversi aset tertentu menjadi uang tunai. Rasio ini menilai seberapa likuid perputaran piutang dengan mengukur berapa kali rata-rata perusahaan mendapat pembayaran” “piutang selama periode tertentu. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi penjualan kredit bersih dengan rata-rata piutang”.
4. “*Inventory Turnover*, digunakan untuk menilai berapa kali secara rata-rata persediaan dijual selama suatu periode tersebut. Tujuannya adalah untuk mengukur likuiditas persediaan. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata”.

“Menurut Ross *et. al.*, (2019) terdapat rasio likuiditas lain yaitu *cash ratio*. Dalam penelitian ini, rasio likuiditas menggunakan *proxy Cash Ratio (CASH)*.”

#### **2.4.1 Cash Ratio**

Menurut Kasmir (2012) dalam Susmiandini & Khoirotunnisa, (2017), “rasio kas atau (*cash ratio*) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang”. Rasio kas, ini mengukur kas yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar (Subramanyam, 2014). Menurut Prihadi (2010) dalam Tjhoa (2020), “kas adalah bagian paling likuid dari aset lancar, karena sebenarnya yang digunakan untuk membayar utang adalah kas. Oleh karena itu rasio kas (*cash ratio*) menawarkan perhitungan kemampuan kas untuk menutupi seluruh utang jangka pendek” (Tjhoa, 2020).

Menurut Subramanyam, (2014) “kas yang dipegang oleh perusahaan yang dikelola dengan baik terutama dari cadangan pencegahan dimaksudkan untuk menjaga dari ketidakseimbangan kas jangka pendek”. “Ketersediaan uang kas dapat di tunjukan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat di tarik setiap saat). Rasio ini sangat penting bagi perusahaan dikarenakan kegagalan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dapat mengakibatkan kebangkrutan perusahaan” (Rusnaeni, 2018).

“Dalam memeriksa aset likuid (*cash & cash equivalent*), perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa hal, misalnya jika setara kas diinvestasikan dalam sekuritas ekuitas, perusahaan mengambil risiko pengurangan likuiditas jika nilai pasar dari investasi tersebut menolak. Lalu kas dan setara kas terkadang diperlukan “untuk dipertahankan sebagai saldo kompensasi untuk mendukung pengaturan pinjaman yang ada atau sebagai jaminan untuk utang” (Subramanyam, 2014).

“Jika jumlah kas untuk asosiasi (perusahaan) terlalu rendah, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki isu yang cepat dalam menangani tagihan” (Gibson, 2013 dalam Nnubia, 2021). Nnubia, (2021) menambahkan “jumlah uang tunai yang rendah menjadi penanda kerangka kerja khusus sebuah perusahaan dalam memiliki penyimpanan uang yang rendah. Selain itu, jumlah uang yang”

“lebih tinggi sebenarnya tidak mencerminkan kinerja asosiasi yang kuat. Jumlah uang tunai yang tinggi mungkin menunjukkan bahwa suatu asosiasi tidak efisien dalam pemanfaatan uang tunai atau tidak memperbesar kemungkinan manfaat dari kredit biaya yang dapat diabaikan. Ini mungkin juga menunjukkan bahwa asosiasi khawatir tentang efisiensi masa depan dan mengumpulkan modal pelindung” (Nnubia, 2021).

Menurut Murhadi, (2015) dalam Napitupulu & Afrina, (2020), “semakin tinggi rasio kas maka menunjukkan semakin likuid perusahaan untuk melunasi liabilitas yang jatuh tempo. Namun bila rasio kas yang terlalu tinggi, akan memberikan dampak negatif karena memegang kas dan setara kas dalam jumlah yang besar tidak memberikan imbal hasil yang memadai” (Napitupulu & Afrina, 2020). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Rusnaeni, (2018) yaitu “*cash ratio* yang terlalu tinggi juga tidak bagus, karena menunjukkan banyaknya dana yang menganggur yang akhirnya dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba”.

Perhitungan *Cash Ratio* berdasarkan Kasmir (2012), dalam Tjhoa (2020) sebagai berikut”:

$$CASH = \frac{Cash \ \& \ Cash \ Equivalenst}{Current \ Liabilities} \quad [2.6]$$

Rumus 2.6 Formula *Cash Ratio*  
 Sumber: Kasmir, (2017) dalam Tjhoa, (2020)

Keterangan:

*Cash & Cash Equivalents*: kas dan setara kas

*Current Liabilities*: utang jangka pendek

“*Cash* (uang tunai) terdiri dari uang logam, mata uang (uang kertas), cek, wesel, dan uang di tangan atau di deposito di bank atau penyimpanan serupa. Perusahaan melaporkan *cash* dalam dua laporan yang berbeda: laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) dan laporan arus kas (*statement of cash flows*). Laporan posisi keuangan melaporkan jumlah kas yang tersedia pada waktu



tertentu. Laporan arus kas menunjukkan sumber dan penggunaan kas selama” “periode waktu tertentu” (Weygandt, *et. al.*, 2019). “Banyak perusahaan menggunakan sebutan “*Cash & Cash Equivalents*” dalam melaporkan kas. *Cash equivalents* adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yaitu: dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah yang diketahui, dan begitu dekat dengan jatuh temponya sehingga nilai pasarnya relatif tidak sensitif terhadap perubahan tarif bunga. (Umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo asli tiga bulan atau kurang yang memenuhi syarat kedua). Contoh *cash equivalents* adalah tagihan *treasury*, surat berharga (catatan perusahaan jangka pendek), dan dana pasar uang” (Weygandt, *et. al.*, 2019).

Terkait dengan pelaporan, akun kas disajikan dalam laporan arus kas, dalam PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas menyatakan bahwa “informasi tentang arus kas entitas berguna dalam menyediakan pengguna laporan keuangan dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut”, kemudian dalam nomor 10 “laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan”. “Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas” (IAI 2018, PSAK 2).

“Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi terbagi menjadi 2 metode yaitu” (IAI, (2018) PSAK 2 nomor 18)”:

- a. “Metode langsung, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan; atau”
- b. “Metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau

masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan”.

“Liabilitas adalah kewajiban saat ini yang dimiliki oleh perusahaan yang timbul dari periode sebelumnya, yang penyelesaiannya diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mewujudkan adanya manfaat ekonomi” Kieso *et al.*, (2018). Menurut (Kieso *et al.*, 2018) “*Current Liabilities*, adalah kewajiban yang secara umum diharapkan oleh perusahaan untuk diselesaikan dalam siklus operasi normalnya atau satu tahun, mana yang lebih lama”. Konsep ini meliputi:

1. “Utang hasil perolehan barang dan jasa: utang usaha, utang gaji dan upah, utang pajak penghasilan, dan sebagainya”.
2. “Koleksi yang diterima di muka untuk penyerahan barang atau pelaksanaan layanan, seperti pendapatan sewa yang belum dibayar atau pendapatan langganan yang belum diterima”.
3. “Liabilitas lain yang likuidasi akan terjadi dalam siklus operasi atau satu tahun, seperti porsi obligasi jangka panjang yang dibayarkan pada periode berjalan, kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan, atau estimasi liabilitas, seperti kewajiban jaminan. Sebagaimana ditunjukkan sebelumnya, estimasi kewajiban sering disebut sebagai provisi”.

“Perusahaan mencantumkan masing-masing jenis utama kewajiban lancar secara terpisah dalam kategori ini. Selain itu, perusahaan mengungkapkan persyaratan wesel bayar dan informasi penting lainnya tentang masing-masing pos dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut merupakan ilustrasi dari pos kewajiban lancar dalam laporan posisi keuangan” (Weygandt, *et. al.*, 2019).

Croix Beverages Statement of Financial Position December 31, 2020 (partial, in thousands)	
Current liabilities	
Notes payable	€ 4,157
Accounts payable	3,990
Accrued expenses	1,847
Salaries and wages payable	1,730
Unearned revenues	555
Income taxes payable	259
Warranty liability	141
Long-term debt due within one year	3,531
Total current liabilities	<u>€16,210</u>

Gambar 2.5 Ilustrasi penyajian akun kewajiban lancar pada laporan posisi keuangan  
Sumber: Weygandt, *et. al.*, (2019)

#### 2.4.2 Pengaruh *Cash Ratio* terhadap *Dividend Payout Ratio*

“Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan dalam kebijakan dividen. Karena dividen merupakan arus kas keluar, maka semakin besar jumlah kas yang tersedia dan likuiditas perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen” (Martono dan Harjito, 2005 dalam Susmiandini & Khoirotunnisa, 2017). “Perusahaan yang menunjukkan kendala pembayaran (kekurangan likuiditas) mengarahkan manajemen untuk membatasi pertumbuhan dividen”. “Dengan kata lain, meningkatnya posisi *cash ratio* juga akan meningkatkan pembayaran dividen” (Sharakas, 2005 dalam Susmiandini & Khoirotunnisa, 2017).

“Manajemen perusahaan harus mempertimbangkan antara ketersediaan kas perusahaan, dengan kebutuhan operasional perusahaan dalam membuat kebijakan dividen. Semakin tinggi *Cash Ratio*, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi utang lancarnya, sehingga kas yang tersisa setelah pembayaran utang lancar berpotensi untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham. Jika dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham lebih besar dari laba yang diestimasi dapat diterima oleh para pemegang saham, maka *Dividend Payout Ratio* akan meningkat” (Tjhoa, 2020).

Hasil dari penelitian Tjhoa (2020) serta Susmiandini & Khoirotunnisa (2017), “menunjukkan bahwa *Cash Ratio* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan *Dividend Payout Ratio*.” Namun dalam penelitian Handayani (2017) menunjukkan

bahwa “*Cash Ratio* tidak berpengaruh signifikan dan memberikan pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen”.

***H<sub>a2</sub>: Cash Ratio (CASH) berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR)***

## **2.5 Solvability Ratio**

“*Solvency ratio, measures the ability of a company to survive over a long period of time. Long term creditors and shareholders are particularly interested in a company ability to pay interest as it comes to due and to repay the face value of the debt at maturity*” yang dapat diartikan “rasio solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang suatu periode. Kreditor dan *shareholder* jangka panjang tertarik dengan perusahaan yang memiliki kemampuan dalam membayar bunga pada saat jatuh tempo, dan kemampuan perusahaan dalam membayar kembali utang pada saat jatuh tempo” (Weygandt, *et. al.*, 2019).

Jenis-jenis rasio solvabilitas atau *leverage* menurut Zutter & Scott, (2017) & Ross *et. al.*, (2019) sebagai berikut:

1. “*Debt to Assets Ratio*, mengukur persentase total aset yang diberikan kreditor. Dapat dihitung dengan membagi total kewajiban (kewajiban lancar dan tidak lancar) dengan total aset. Rasio ini menunjukkan tingkat *leverage* perusahaan. Hal ini juga memberikan beberapa indikasi kemampuan perusahaan untuk menahan kerugian tanpa merugikan kepentingan kreditor” (Weygandt, *et. al.*, 2019).
2. “*Debt to Equity Ratio*, rasio total utang memperhitungkan semua utang dari semua jatuh tempo kepada semua kreditor” (Ross *et. al.*, 2019). Menurut Zutter & Scott, (2017) “rasio utang terhadap ekuitas mengukur proporsi relatif dari total kewajiban terhadap ekuitas saham biasa yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Rasio utang terhadap ekuitas yang lebih tinggi berarti bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak *leverage* keuangan”.
3. “*Long Term Debt to Equity Ratio*, rasio utang jangka panjang terhadap modal ekuitas mengukur hubungan utang jangka panjang (biasanya didefinisikan

sebagai semua kewajiban tidak lancar) dengan modal ekuitas. Rasio lebih dari 1:1 menunjukkan pembiayaan utang jangka panjang yang lebih besar dibandingkan dengan modal ekuitas” (Subramanyam, 2014).

4. “*Times Interest Earned Ratio*, mengukur kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran bunga kontraktual. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban bunganya” (Zutter & Scott, 2017). “*Time Interest Earned* memberikan indikasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga pada saat jatuh tempo” (Weygandt, *et. al.*, 2019).
5. “*Fixed Charge Coverage*, *fixed charge coverage* atau *fixed payment coverage* mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban pembayaran tetap seperti bunga dan pokok pinjaman, pembayaran sewa, dan dividen saham preferen. Seperti halnya rasio pendapatan bunga kali, semakin tinggi nilai ini, semakin baik” (Zutter & Scott, 2017).

Dalam penelitian ini, rasio solvabilitas menggunakan *proxy Debt to Equity Ratio (DER)*.

### 2.5.1 *Debt to Equity Ratio*

“Menurut Silanno & Loupatty, (2021) “rasio utang modal (*DER*) adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan utang”. Menurut Widyawati dan Indriani (2019), perhitungan *DER* bertujuan untuk mengetahui jumlah ekuitas yang tersedia sebagai cadangan untuk pembayaran kewajibannya” (Tjhoa, 2020).

“Struktur modal adalah ekuitas dan pembiayaan utang perusahaan. *Equity* mengacu pada risiko modal sebuah perusahaan. Karakteristik pembiayaan ekuitas termasuk tidak pasti atau tidak ditentukan pengembalian dan kurangnya pola pembayaran, sedangkan pembiayaan utang harus untuk dibayarkan kembali” (Subramanyam, 2014). “Target struktur modal adalah penggabungan dari pembiayaan utang dan ekuitas, yang diinginkan perusahaan dalam jangka panjang.

Target struktur modal harus mencerminkan perpaduan optimal antara utang dan ekuitas perusahaan tertentu” (Zutter & Scott, 2017).

Menurut Weygandt. *et. al.*, (2019), “pembiayaan perusahaan dari utang memiliki keuntungan tersendiri dibandingkan dengan saham biasa. Salah satu alasan untuk menerbitkan obligasi adalah bahwa pemegang obligasi (*bondholders*) tidak mempengaruhi kontrol pemegang saham (*shareholders*). Dikarenakan pemegang obligasi tidak memiliki hak suara, maka pemegang saham dapat” “meningkatkan modal dengan obligasi, dan tetap dapat mempertahankan kendali perusahaan. Selain itu, obligasi menarik bagi perusahaan karena biaya bunga obligasi dapat dikurangkan dari pajak. Sehingga hasil dari perlakuan pajak ini, obligasi dapat menghasilkan biaya modal yang lebih rendah daripada pembiayaan ekuitas, yang mana dividen saham tidak ditawarkan” (Weygandt. *et. al.*, 2019).

Subramanyam, (2014) menyatakan “dari sudut pandang pemegang saham, utang adalah sumber pembiayaan eksternal yang lebih disukai untuk setidaknya dua alasan yaitu, bunga pada sebagian besar hutang adalah tetap dan menyediakan biaya bunga yang lebih kecil daripada *return* atas aset operasi bersih (*net operating assets*), kelebihan *return* adalah untuk kepentingan investor ekuitas. Alasan kedua bunga adalah beban yang dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dividen tidak”. “Semakin lama jangka waktu pembayaran utang dan semakin sedikit tuntutan ketentuan pembayarannya, semakin mudah bagi perusahaan untuk melayani modal utang. Namun, utang harus dilunasi pada waktu tertentu terlepas dari kondisi keuangan perusahaan, dan demikian juga harus membayar bunga berkala pada sebagian besar utang” (Subramanyam, 2014).

“Kegagalan untuk membayar pokok dan bunga biasanya mengakibatkan proses hukum yaitu pemegang saham biasa dapat kehilangan kendali atas perusahaan dan semua atau sebagian dari investasi *shareholders*” (Subramanyam, 2014). Weygandt. *et. al.*, (2019) juga berpendapat demikian “kerugian utama menggunakan pembiayaan utang adalah perusahaan harus membayar bunga secara berkala. Selain itu, perusahaan juga harus membayar kembali pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Sebuah perusahaan dengan pendapatan yang berfluktuasi dan posisi kas yang relatif lemah mungkin memiliki kesulitan besar dalam melakukan



pembayaran bunga ketika pendapatannya rendah. Selain itu, ketika ekonomi, pasar sekuritas, atau pendapatan perusahaan terhambat, pembayaran utang dapat menghabiskan uang tunai dengan cepat dan membatasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya” (Weygandt. *et. al.*, 2019).

Nuhu. *et. al.*, (2014) dalam Febrianti & Zulvia, (2020) memaparkan bahwa, “perusahaan-perusahaan yang sebagian besar membiayai kegiatan mereka dengan utang memberikan tekanan pada likuiditas mereka. Pembayaran pokok dan bunga” “mengurangi kemampuan perusahaan untuk memiliki sisa pendapatan”. Subramanyam, (2014) juga menegaskan “ketika proporsi utang dalam total struktur modal perusahaan lebih besar, semakin tinggi biaya tetap dan komitmen pembayaran yang dihasilkan. Kemungkinan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar bunga dan pokok pada saat jatuh tempo dan potensi kerugian bagi kreditur juga meningkat”. Gunawan & Harjanto, (2019) menyatakan ”perusahaan dengan tingkat *Debt to Equity Ratio* yang tinggi lebih berisiko karena memiliki kewajiban untuk membayar pokok utang dan bunga. Tingginya kewajiban yang harus dibayarkan akan mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan”.

Menurut Zutter & Scott, (2017) “pendanaan ekuitas terdiri dari dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan (investor atau pemegang saham), dan pemegang saham memperoleh pengembalian yang tidak dijamin tetapi terikat dengan kinerja perusahaan”. Terdapat poin perbedaan terkait dengan modal ekuitas menurut Zutter & Scott, (2017), “pemegang saham adalah pemilik perusahaan. Pemegang saham umumnya memiliki hak suara yang memungkinkan mereka untuk memilih direktur perusahaan dan memberikan suara khusus. Sebaliknya, *debt holders* tidak memiliki hak suara tetapi sebaliknya mengandalkan kewajiban kontraktual perusahaan untuk menjadi suara mereka”. “Tidak seperti utang, ekuitas adalah bentuk pembiayaan permanen bagi perusahaan. Sehingga ekuitas tidak mempunyai “*maturity*” (jatuh tempo), jadi pembayaran kembali tidak diperlukan dalam pembiayaan ekuitas” (Zutter & Scott, 2017).

Menurut Subramanyam, (2014) “modal ekuitas berkontribusi pada stabilitas dan solvabilitas perusahaan”. “Bagi kreditur, peningkatan modal ekuitas lebih disukai sebagai perlindungan terhadap kerugian dari kesulitan. Kreditur umumnya

tidak bersedia memberikan pembiayaan tanpa perlindungan yang diberikan oleh pembiayaan dari ekuitas. Menurunkan modal ekuitas sebagai bagian proporsional dari pembiayaan perusahaan menurunkan perlindungan kreditur terhadap kerugian dan akibatnya meningkatkan risiko kredit” (Subramanyam, 2014). “Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi mengurangi utang dan mengutamakan penggunaan dana internal sebagai biaya investasi dan untuk menghindari kemungkinan kebangkrutan dan risiko keuangan. Sedangkan perusahaan dengan” “tingkat pertumbuhan rendah yang menghasilkan profitabilitas rendah akan meningkatkan penggunaan hutang untuk membiayai perusahaan” (Zurriah & Sembiring, 2018).

Menurut pernyataan dari Gunawan & Harjanto, (2019) yaitu “semakin rendah rasio *leverage* menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan dengan modal sendiri”. Menurut Hanif & Bustamam, (2017) “semakin rendah *DER* maka akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajibannya. Semakin besar penggunaan utang maka dapat berdampak pada *financial distress* dan kebangkrutan”. Perhitungan *Debt to Equity Ratio* berdasarkan Ross *et. al.*, (2019) sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \quad [2.7]$$

Rumus 2.7 Formula *Debt to Equity Ratio*  
 Sumber: Ross *et. al.*, (2019)

Keterangan:

*Total Debt*: total utang jangka pendek dan jangka panjang

*Total Equity*: total ekuitas

Menurut Kieso *et. al.*, (2018) “liabilitas adalah kewajiban saat ini yang dimiliki oleh perusahaan yang timbul dari periode sebelumnya, yang penyelesaiannya diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya

perusahaan yang mewujudkan adanya manfaat ekonomi”. Menurut Kieso *et al.*, (2018), Liabilitas dibagi menjadi 2 yaitu *Current Liabilities* dan *Non-Current Liabilities*.

“*Non-Current Liabilities*, adalah kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam waktu yang lebih lama dari satu tahun atau siklus operasi normal. Contoh yang paling umum adalah utang obligasi, utang wesel bayar, berapa jumlah pajak penghasilan tangguhan, kewajiban sewa, dan kewajiban pensiun” (Kieso *et. al.*, 2018). “Secara umum, kewajiban tidak lancar terdiri dari tiga jenis”:

1. “Kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang.
2. Kewajiban yang timbul dari operasi biasa perusahaan, seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan.
3. Kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar, atau pembayaran, atau tanggal yang harus dibayar, seperti jaminan layanan atau produk, kewajiban lingkungan, dan restrukturisasi, sering disebut sebagai ketentuan”.

Penyajian liabilitas dalam laporan keuangan tertuang pada PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan nomor 54 yang berbunyi: “informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan mencakup pos-pos berikut utang usaha dan utang lain; provisi; liabilitas keuangan; liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46; liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58” (IAI, 2018). Dasar pengukuran aset diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yaitu:

1. “Biaya Historis. Imbalan yang diterima (setelah dikurangi biaya transaksi) untuk mengambil alih bagian dari liabilitas yang belum terpenuhi, dan jumlahnya meningkat akibat kelebihan estimasi arus kas keluar di atas imbalan yang diterima”.

2. “Nilai wajar (asumsi pelaku pasar). Harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan bagian dari liabilitas yang belum terpenuhi (tidak termasuk biaya transaksi yang akan timbul pada saat pengalihan)”.
3. “Nilai pakai (asumsi spesifik-entitas). Nilai kini dari arus kas masa depan yang akan timbul untuk memenuhi bagian dari liabilitas yang belum terpenuhi (termasuk nilai kini dari biaya transaksi yang akan timbul dalam pemenuhan atau pengalihan)”.
4. “Biaya kini. Imbalan (setelah dikurangi biaya transaksi) yang akan diterima saat ini untuk mengambil alih bagian dari liabilitas yang belum terpenuhi”, “dan jumlahnya meningkat akibat kelebihan estimasi arus kas keluar di atas imbalan tersebut”.

KELOMPOK USAHA XYZ		
Laporan posisi keuangan per 31 Desember 20X7		
(dalam ribuan rupiah)		
	31 Des 20X7	31 Des 20X6
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	312.400	322.900
Piutang usaha	91.600	110.800
Persediaan	135.230	132.500
Aset lancar lain	25.650	12.540
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>564.880</b>	<b>578.740</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Investasi pada instrumen ekuitas	142.500	156.000
Investasi dalam entitas asosiasi	100.150	110.770
Aset tetap	350.700	360.020
Aset takberwujud lain	227.470	227.470
Goodwill	80.800	91.200
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>901.620</b>	<b>945.460</b>
<b>Total Aset</b>	<b>1.466.500</b>	<b>1.524.200</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha dan utang lain	115.100	187.620
Pinjaman jangka pendek	150.000	200.000
Bagian pinjaman jangka panjang	10.000	20.000
Utang pajak jangka pendek	35.000	42.000
Provisi jangka pendek	5.000	4.800
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>315.100</b>	<b>454.420</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Pinjaman jangka panjang	120.000	160.000
Pajak tangguhan	28.800	26.040
Provisi jangka panjang	28.850	52.240
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>177.650</b>	<b>238.280</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>492.750</b>	<b>692.700</b>

Gambar 2.6 Ilustrasi penyajian akun liabilitas pada laporan posisi keuangan  
Sumber: PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2018)

“Ekuitas adalah bunga residual atas aset ekuitas setelah dikurangi semua kewajibannya (Kieso *et. al.*, 2018). “Pada umumnya perusahaan membagi ekuitas menjadi 6 bagian” (Kieso *et. al.*, 2018):

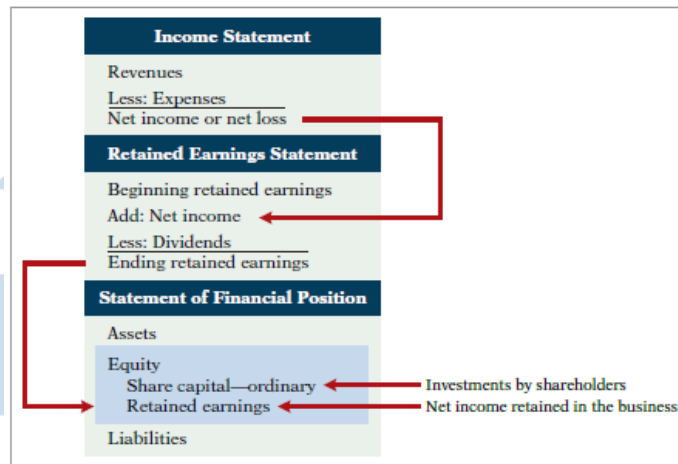
1. *Share Ordinary*, nilai nominal atau nilai saham yang diterbitkan. Ini termasuk saham biasa (kadang-kadang disebut sebagai saham biasa) dan saham preferen (kadang-kadang disebut sebagai saham preferen).

2. *Share Premium*, kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas par atau nilai yang dinyatakan.
3. *Retained Earnings*, penghasilan perusahaan yang tidak didistribusikan.
4. *Accumulated Other Comprehensive Income*, jumlah agregat item pendapatan komprehensif lain.
5. *Treasury Stock*, umumnya, jumlah saham biasa yang dibeli kembali.
6. *Non-Controlling Interest (Minority Interest)*, sebagian ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor”.

“Menurut KKPK, IAI (2018) “ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas”. “Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Dengan kata lain, ekuitas adalah klaim terhadap entitas yang tidak memenuhi definisi liabilitas. Klaim tersebut dapat dibuat berdasarkan kontrak, undang-undang atau cara serupa, dan termasuk, sepanjang tidak memenuhi definisi liabilitas: saham dari berbagai, yang dikeluarkan oleh entitas; dan beberapa kewajiban entitas untuk menerbitkan klaim ekuitas lainnya” (IAI, 2018 KKPK).

Dikutip dalam Weygandt. *et. al.*, (2019) “perusahaan melaporkan modal saham laba biasa (*share capital*) dan saldo laba (*retained earnings*) di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan. Perusahaan melaporkan dividen pada *statement of changes in equity*. Serta perusahaan melaporkan pendapatan dan beban pada laporan laba rugi. Dividen, pendapatan, dan beban akhirnya ditransfer ke saldo laba pada akhir periode. Akibatnya, perubahan salah satu dari tiga item (dividen, pendapatan dan beban) ini mempengaruhi ekuitas.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A



Gambar 2.7 Ilustrasi penyajian dan hubungan terkait ekuitas  
 Sumber: Weygandt *et. al.*, (2019)

### 2.5.2 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap *Dividend Payout Ratio*

“*DER* menunjukkan perbandingan antara total utang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri” (Martono dan Harjito, 2007 dalam Lie & Osesoga, 2020). “Semakin rendah *DER* perusahaan maka menunjukkan bahwa jumlah utang” “perusahaan lebih kecil dari jumlah modal perusahaan. *DER* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal dibanding utang sebagai sumber pembiayaan. Semakin rendah jumlah utang perusahaan mengakibatkan beban bunga yang perlu dibayarkan perusahaan akan semakin rendah dan pembayaran utang melalui kas juga akan semakin rendah. Semakin rendah beban bunga akan mengakibatkan laba perusahaan meningkat dan semakin rendah pembayaran utang akan meningkatkan saldo kas yang tersedia. Dengan meningkatnya laba perusahaan, maka *retained earning* perusahaan meningkat. Semakin tinggi *retained earning* perusahaan maka akan meningkatkan potensi perusahaan untuk membagikan laba dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Ketika dividen tunai yang dibagikan lebih besar daripada laba yang dijanjikan perusahaan, maka *Dividend Payout Ratio* akan meningkat. Dapat diartikan bahwa semakin rendah nilai *DER*, maka *Dividend Payout Ratio* akan semakin tinggi” (Lie & Osesoga, 2020).

Penelitian dari Febrianti & Zulvia (2020), dan Handayani, (2017) “mengatakan *Debt to Equity Ratio* memberikan pengaruh negatif yang signifikan



terhadap *Dividend Payout Ratio*”, namun Hanif & Bustamam, (2017) dan Gunawan & Harjanto (2019) mengatakan bahwa “*leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*.”

***Ha<sub>3</sub>: Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR)***

## **2.6 Firm Size**

“Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43/POJK.04/2020 pasal 1(satu) ayat 7(tujuh) sampai 8(delapan), kelompok usaha terbagi atas”:

1. “Emiten dengan Aset Skala Kecil yang selanjutnya disebut Emiten Skala Kecil adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
  - a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
  - b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
    - i. “pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; dan/atau
    - ii. perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”.
2. “Emiten dengan Aset Skala Menengah yang selanjutnya disebut Emiten Skala Menengah adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
  - a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
  - b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
    - i. pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan/atau
    - ii. perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”.

Menurut Nurlatifah, (2021) “*firm size* atau ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, yang ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*)”. “Perusahaan yang berukuran besar akan memiliki akses yang lebih mudah menuju pasar modal” (Hanif & Bustamam, 2017). Tjhoa, (2021) mengatakan “perusahaan dengan skala ukuran besar juga biasanya sudah berada dalam tahap *maturity*, memiliki tingkat keuntungan yang stabil dan tidak lagi berfokus pada pengembangan perusahaan yang membutuhkan biaya tinggi”. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Korner, (2006) dalam Hanif & Bustamam, (2017) yaitu “perusahaan berskala besar memiliki biaya agensi yang lebih rendah serta dapat secara mudah memasuki pasar modal serta memiliki *bargaining power* yang lebih kuat daripada perusahaan berskala kecil”.

Namun Margono & Gantino, (2021) berpendapat “ukuran perusahaan dinilai berdampak pada nilai perusahaan karena terus meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mendapatkan pemasukan dana” “yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, tetapi disisi lain dapat menimbulkan utang yang besar, karena risiko perusahaan dalam memenuhi kewajibannya cukup kecil”.

“Ukuran perusahaan atau *firm size* cenderung mencerminkan penilaian pemegang saham atas keseluruhan aspek dari *financial performance* di masa lampau dan perkiraan di masa yang akan datang. Semakin besarnya aset perusahaan akan membuat perusahaan memiliki kestabilan dalam kondisi keuangannya sehingga akan lebih mudah dalam memperoleh modal dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih rendah” (Nurlatifah, 2021). Halim, (2015) dalam Nurlatifah, (2021) juga menambahkan “semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang operasionalnya, dan salah satu alternatif pemenuhannya adalah dengan modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi” (Nurlatifah, 2021).

“Semakin besar dan mapan perusahaan akan memiliki pemikiran yang lebih luas, memiliki kualitas karyawan yang tinggi, dan sumber informasi yang banyak bila dibandingkan dengan perusahaan yang kecil yang belum mapan” (Sari, Oemar dan Andini, 2016 dalam Gunawan & Harjanto, 2019). “ukuran perusahaan dapat dilihat dari besarnya total aset yang dimiliki. Semakin besar jumlah total aset yang dimiliki menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik pada masa depan. Selain itu, perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba bernilai positif” (Gunawan & Harjanto, 2019).

“Sementara perusahaan yang baru dan masih kecil akan mengalami banyak kesulitan untuk memiliki akses ke pasar modal sehingga kemampuannya untuk mendapatkan modal dan memperoleh pinjaman dari pasar modal juga terbatas. Oleh karena itu perusahaan cenderung akan menahan laba guna membiayai operasinya” (Handayani & Hadinugroho, 2009 dalam Kristanti, 2021). Perhitungan *Firm Size* berdasarkan Taliyang, (2011) dalam Nurlatifah, (2021) sebagai berikut”:

$$SIZE = Ln (Total Assets) \quad [2.8]$$

Rumus 2.8 Formula *Firm Size*  
 Sumber: Taliyang, (2011) dalam Nurlatifah, (2021)

“Keterangan:

- Ln* : logaritma natural
- Total Assets* : total aset dalam periode tertentu

“Berdasarkan IAI (2018) PSAK 19 nomor 08, aset adalah sumber daya yang:

1. Dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu; dan
2. Manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas (IAI 2018, PSAK 19 nomor 08)”.

“Kemudian aset terbagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar tercantum dalam PSAK 1 nomor 66, yang berisikan entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika” (IAI, 2018):

1. “Entitas memperkirakan akan merealisasi aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;

2. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
3. Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
4. Aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas), kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan”.

“Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar”. Aset tidak lancar mencakup aset tetap, aset tak berwujud dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang” (IAI, 2018).

“Berdasarkan IAI, (2018) PSAK 16 nomor 06 aset tetap adalah aset berwujud yang”:

1. “Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif”; dan
2. “Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.

“Pengukuran saat pengakuan untuk aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan” (IAI, 2018 PSAK 16 nomor 15). Berikut merupakan elemen biaya perolehan menurut PSAK 16:

- a) “Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain”.
- b) “Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen”.
- c) “Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut”.

“Berdasarkan IAI, (2018) PSAK 19 nomor 21, aset tak berwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:

1. “Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal” (IAI 2018, PSAK 19 nomor 21).

Kriteria selanjutnya untuk dianggap sebagai pengakuan dalam aset tak berwujud yaitu (IAI, 2018 PSAK 19 nomor 22 & 23 dalam nomor 18):

1. “Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomik masa depan, entitas menggunakan asumsi rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang merepresentasikan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomik yang berlaku sepanjang umur manfaat aset tersebut”.
2. “Dalam menilai tingkat kepastian adanya manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari penggunaan aset tak berwujud, entitas mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aset tak berwujud dengan memberikan penekanan yang lebih besar pada bukti eksternal”.

### **2.6.1 Pengaruh *Firm Size* terhadap *Dividend Payout Ratio***

“Menurut Novianti (2012) dalam Febrianti & Zulvia (2020), “ukuran perusahaan menunjukkan skala besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan dan rata-rata total aktiva yang dimiliki perusahaan. Salah satu skala alat ukur besar kecilnya sebuah perusahaan dilihat dari nilai total aset yang dimiliki perusahaan, nilai total aset dinilai lebih stabil dalam menunjukkan besar kecil sebuah perusahaan” (Febrianti & Zulvia, 2020).

“Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar diperkirakan akan memiliki kemampuan untuk menghasilkan *earning* yang lebih besar, sehingga akan mampu membayar dividen yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil (Hatta, 2002 dalam Hanif & Bustamam, 2017). Hal ini sejalan dengan pernyataan dari

Gunawan & Harjanto, 2019 yaitu “ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan salah satu alat ukur besar kecilnya perusahaan. Semakin tinggi aset perusahaan menggambarkan semakin besar ukuran perusahaan. Semakin tinggi jumlah aset, perusahaan dapat memanfaatkan aset yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, sehingga perusahaan memiliki potensi untuk memperoleh laba yang tinggi. Laba yang tinggi menyebabkan perusahaan memiliki potensi yang besar dalam membagikan dividen kepada para pemegang saham *atau Dividend Payout Ratio* perusahaan tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran kecil” (Gunawan & Harjanto, 2019).

Menurut hasil penelitian dari Febrianti & Zulvia (2020) dan Nurlatifah (2021) “ukuran perusahaan atau *firm size* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *dividend payout ratio*”. Sedangkan menurut hasil penelitian dari Hanif & Bustamam (2017), “ukuran perusahaan atau *firm size* tidak memberikan pengaruh terhadap *dividend payout ratio*”. Namun hasil penelitian dari Fadah, (2020) menyatakan bahwa “*size* memberikan pengaruh negatif dan insignifikan terhadap *dividend payout ratio*”.

**Ha<sub>4</sub>: Firm Size (SIZE) berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR)**

## **2.7 Pengaruh Return on Asset, Cash Ratio, Debt To Equity Ratio, dan Firm Size terhadap Dividend Payout Ratio secara simultan**

“Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gunawan & Harjanto, (2019) menyatakan bahwa “Profitabilitas (*ROE*), leverage (*DER*), ukuran perusahaan (*size*), pertumbuhan perusahaan (*growth*) dan kepemilikan manajerial (*KM*) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen (*DPR*)”. Hasil penelitian Hanif & Bustamam, (2017) menyebutkan “*debt to equity ratio, return on asset, firm size, dan earnings per share* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *dividend payout ratio*”. Di lain sisi hasil dari penelitian Hantono, (2019) menyatakan “*Return on Assets, Free Cash Flow, Debt to Equity Ratio, Pertumbuhan Penjualan* secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen”. Hasil

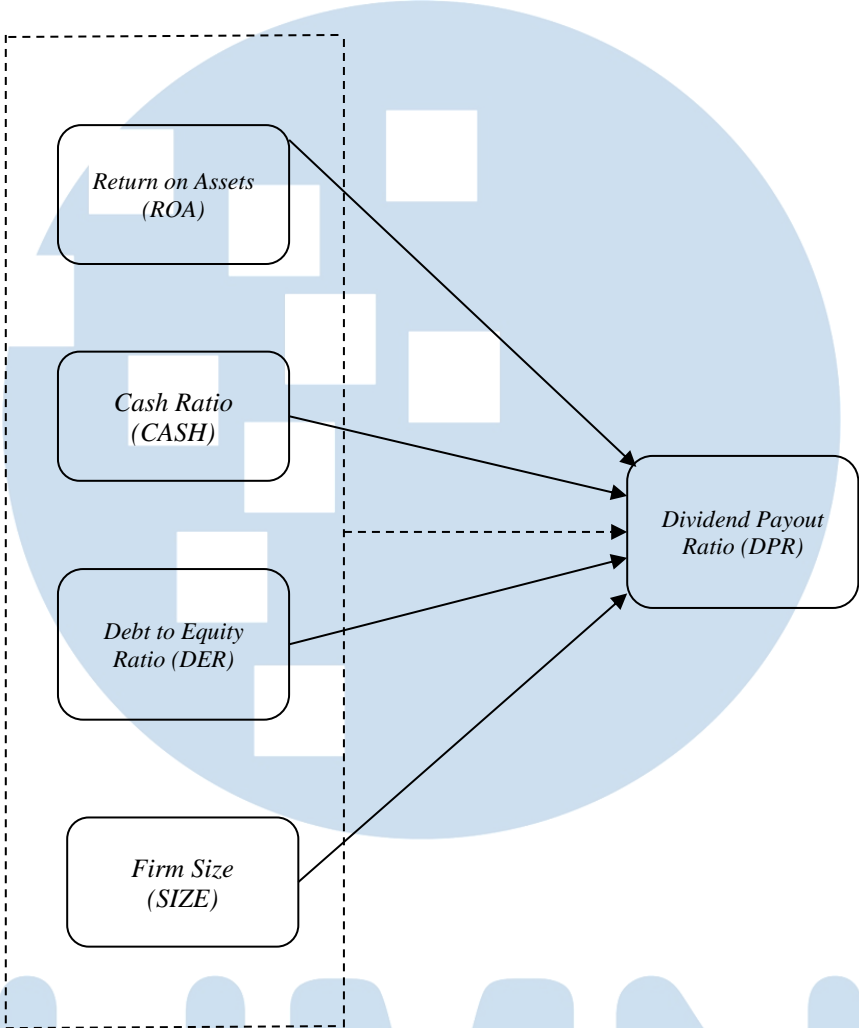


penelitian yang dilakukan oleh Krisardiyansah & Amanah (2020), menyatakan bahwa “*Free Cash Flow*, Profitabilitas, Likuiditas dan *Leverage* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lie & Osesoga, (2020), menyatakan “*Return on Assets*, *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio* dan *Managerial Ownership*, berpengaruh secara simultan terhadap *Dividend Payout Ratio*”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjhoa (2020) “*Free Cash Flow*, *Company’s Growth*, *Return on Assets*, *Cash Ratio*, *Firm Size* dan *Debt to Equity* secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*”. Begitupun dengan hasil penelitian dari Widyawati & Indriani, (2019) yang mengatakan “*Return on Assets (ROA)*, *Growth Sales (GROWTH)*, *Debt to Equity (DER)*, *Lagged Dividend (LAGDIV)*, dan *Firm Size (SIZE)* berpengaruh signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio (PAYOUT)*”.



**2.8 Model Penelitian**



Gambar 2.8 Model Penelitian

